

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang Pemilu, atmosfer dunia pendidikan agaknya tak kalah seru. Jenjang pendidikan di sekolah khususnya SMA menjadi target untuk mendulang suara dari pemilih pemula. Naluri politik para politikus negeri ini agaknya telah mencium kalau dunia pendidikan bisa menjadi basis yang strategis untuk menaikkan pamor politik. Tak heran jika para caleg berupaya meraih simpati dari kalangan guru dan siswa. Meski sudah ada larangan berkampanye di lembaga pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, mereka tetap melakukannya meski dengan cara sembunyi-sembunyi.

Apa pun wujudnya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kampanye politik merupakan bentuk propaganda yang telah mengarah pada politik praktis. Trauma politik selama rezim Orde Baru memang dinilai telah menciptakan luka politik bagi generasi masa depan negeri ini. Mereka sengaja dibutakan dari berbagai persoalan sosial-politik kebangsaan. Anak-anak masa depan negeri ini hanya diarahkan untuk menjadi robot-robot zaman yang harus menghamba pada sang pengendali kekuasaan.

Meski demikian, sejarah politik yang kelam semacam itu tidak harus dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap politisasi pendidikan. Anak-anak negeri ini memang perlu melek politik. Mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negerinya. Akan

tetapi, pendidikan politik yang perlu diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan bukanlah dalam bentuk propaganda politik praktis yang akan mengarah pada proses pembusukan intelektual, melainkan pendidikan politik yang sehat dan mencerahkan.

Para siswa perlu diajak untuk memahami persoalan-persoalan kebangsaan melalui proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Pendidikan politik juga tidak perlu dijadikan sebagai materi pelajaran tersendiri. Berhasil menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran siswa sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah lembaga pendidikan. Melalui penanaman nilai kearifan politik semacam itu diharapkan kelak mereka mampu menjadi pemain-pemain politik yang cerdas dan elegan sehingga tidak mudah melakukan tindakan-tindakan konyol yang bisa merugikan bangsa dan negara.

Kita sungguh prihatin menyaksikan ulah kaum elite politik kita yang sudah kehilangan nilai kearifan politik. Mereka cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai ambisi dan keinginan. Yang lebih menyedihkan, mereka juga tak segan-segan menjatuhkan rival politik melalui praktik “kampanye hitam” yang sangat tidak cerdas. Saling klaim dan sekaligus memberikan stigma kepada lawan politik sudah dianggap sebagai strategi politik yang sah. Yang tidak kalah memprihatinkan, tak sedikit elite politik kita yang tersandung persoalan hukum akibat nihilnya nilai kearifan dan fatsun politik dalam ranah kehidupan politik mereka.

Sungguh, jika situasi semacam itu terus berlanjut dari generasi ke generasi, bukan tidak mungkin negeri kita hanya akan disuguhi permainan akrobat politik

yang tidak masuk akal dan menjenuhkan. Imaji politik seolah-olah sama dan sebangun dengan permainan busuk dan kotor. Padahal, sesungguhnya politik merupakan bagian dari strategi kehidupan untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan secara benar, jujur, cerdas, dan elegan, pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan buat rakyat.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan penanaman nilai-nilai kearifan dan fatsun politik secara benar melalui dunia pendidikan. Dalam pandangan awam saya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas dari minimnya dunia pendidikan politik kita dalam menyentuh nilai-nilai kearifan politik. Selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, para siswa didik (nyaris) tak pernah mendapatkan pendidikan politik secara benar. Mereka belajar politik secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah sarat dengan pembusukan dan anomali politik. Imbasnya sudah bisa ditebak. Ketika terjun ke dalam ranah politik praktis, mereka menjadi abai terhadap nilai-nilai kejujuran, kearifan, dan kesantunan.

Sudah saatnya dunia pendidikan kita mengakomodasi berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup rakyat banyak. Jangan sampai, dunia pendidikan kita berdiri di puncak menara gading kehidupan yang akan mengasingkan anak-anak masa depan negeri ini dari berbagai persoalan riil yang dihadapi bangsa dan negaranya. Dengan kata lain, nilai-nilai kearifan dan kesantunan politik perlu segera disentuh dan diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan yang disajikan secara integratif ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan.

Untuk itu, diperlukan mata pelajaran yang mampu menjawab tantangan tersebut. Tidak heran jika di sekolah, mata pelajaran yang bisa membelajarkan siswa tentang politik adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling penting di sekolah, karena ditujukan untuk membentuk dan mempersiapkan generasi muda agar ikut berperan aktif di dalam kegiatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan politik masa mendatang.

Sebagaimana menurut pandangan Cogan (1999:4) yang mengartikan PKn atau *civic education* sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives", maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Selain aktif dalam masyarakat, keberadaan generasi muda merupakan aset yang berharga dalam kancah perpolitikan, sebab mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara.

PKn di sekolah berperan sebagai pendidikan politik bagi siswa, hal tersebut dijelaskan pula oleh Kartini Kartono (1996:xviii) bahwa salah satu tujuan pendidikan politik adalah membuat rakyat menjadi melek politik/sadar politik. Yang dimaksud dengan melek atau sadar politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup (Ramlan Surbakti, 1999:114).

Oleh karena itu, kemelekan atau kesadaran politik siswa dapat dibentuk salah satunya melalui pembelajaran PKn. Pendapat tersebut telah dipertegas melalui misi PKn yang dikemukakan oleh Maftuh dan Sapriya (2005:321) bahwa :

PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran politik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

Melihat kenyataan di atas, diperlukan suatu metode khusus untuk bisa menyadarkan mereka kembali. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan menumbuhkan rasa kebangsaan tersebut melalui jalur pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran wajib di jenjang sekolah memiliki fungsi sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu saluran dalam menurunkan segenap nilai luhur budaya bangsa kepada generasi selanjutnya.

Sejalan dengan meningkatnya perubahan yang bersifat multidimensional, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya, tuntutan pembelajaran PKn sangat diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Sehingga, Wahab (Cholisin, 2007:11), memberikan batasan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan ialah media pengajaran yang akan meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas dan penuh tanggung jawab. Karena itu program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan,

politik, hukum, negara, serta dari teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Dengan kecenderungan sifat teoretis disiplin politik tetap dominan baik dalam program maupun dalam pengajarannya.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan laboratorium demokrasi awal bagi para siswa dalam memahami berbagai persoalan di masyarakat. Salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan yang utama adalah membentuk karakter warga negara (*nation character building*) dan pembinaan warganegara yang baik dan demokratis (*good and democratic citizenship*). Tugas utama ini membutuhkan upaya profesional dalam pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan untuk mampu menghubungkan dunia sekolah dengan dunia luar sekolah atau dunia idealis dengan dunia realitas.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu bertindak demokratis dalam setiap aspek kegiatannya, memiliki rasa tanggung jawab baik sebagai warga negara lokal, regional, nasional, maupun internasional, dan juga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.

Pendidikan demokrasi yang kini dengan tegas diterima sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan (CICED:1999), dalam Kurikulum 1994 merupakan bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibingkai menjadi satu dengan nilai-nilai masing-masing sila sebagai intinya dalam kedudukan yang setara dan interaktif. Dengan paradigma yang ada itu maka secara substantif di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna pendidikan Pancasila, dalam arti berlandaskan dan berorientasi pada cita-cita dan nilai yang secara koheren dan sistemik terkandung dalam Pancasila.

Konsep-konsep politik yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki misi untuk membina siswa agar melek politik, dalam artian siswa tahu dan paham, mengerti, menyadari, meyakini, dan menegakkan atau melaksanakan segala apa yang ia ketahui dari pembelajaran. Selain itu, melalui pemahaman konsep-konsep politik dalam pendidikan kewarganegaraan siswa dapat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta sadar atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengungkap peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam upaya meningkatkan kesadaran politik siswa. Dasar pemikiran inilah yang menjadikan motivasi peneliti untuk mengungkap kondisi faktual yang terjadi, sehingga mengambil judul penelitian tentang Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Melek Politik Siswa (Studi Deskriptif Analitis terhadap Siswa SMA Negeri di Kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah umum penelitian, yaitu: seberapa besar peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membina melek politik siswa? Secara khusus dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar peranan pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di sekolah dalam membina melek politik siswa?
2. Seberapa besar peranan kompetensi kewarganegaraan terhadap melek politik siswa?

3. Seberapa besar peranan antara pembelajaran PKn dan kompetensi kewarganegaraan secara bersama-sama terhadap melek politik siswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai peranan pembelajaran konsep politik dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Peranan pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di sekolah dalam membina melek politik siswa.
- b. Peranan kompetensi kewarganegaraan terhadap melek politik siswa?
- c. Peranan antara pembelajaran PKn dan kompetensi kewarganegaraan secara bersama-sama terhadap melek politik siswa. Hasil belajar siswa yang melek politik setelah melalui pembelajaran PKn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana demokrasi dalam membina melek politik siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada siswa dan guru PKn dalam rangka mengetahui peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana demokrasi dalam membina melek politik siswa.

E. Definisi Operasional

1. Mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembelajaran PKn merupakan sebuah pembelajaran yang berusaha membina para siswa menjadi manusia di masa depan yang akan hidup dengan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Nasionalisme dan Kebangsaan serta memiliki tanggung jawab yang penuh. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka hal ini dijelaskan oleh Wahab (1996:26) karakteristik Pembelajaran Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar dari warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai warga negara. Pelatihan yang dibutuhkan meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan agar kualitas partisipasinya sebagai warga negara benar-benar dapat diandalkan.

3. Melek politik (*political literacy*) adalah Kecerdasan warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam berpolitik sebagai warganegara yang baik yang tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilakunya.

F. Indikator

Tabel 1.1
Indikator Variabel Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (X₁)

VARIABEL	INDIKATOR
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (variabel X₁)	1. Materi Pembelajaran PKn a. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum. b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat kemampuan berpikir siswa. c. Materi pembelajaran diangkat dari realitas kehidupan siswa d. Materi pembelajaran diorganisasi dari konkrit menuju abstrak e. Materi pembelajaran diorganisasi dari pengalaman praktis menuju teori f. Materi pembelajaran diorganisasi dari lingkungan terdekat siswa, lokal, nasional dan internasional. g. Materi pembelajaran akurat jika ditinjau dari segi keilmuan. h. Materi pembelajaran bersifat aktual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	2. Metode Pembelajaran PKn a. Kesesuaian metode dengan materi pembelajaran b. Variasi metode yang digunakan c. Metode yang digunakan menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran d. Metode yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
	3. Media Pembelajaran PKn a. Menggunakan jenis media visual, audio dan audio visual. b. Kesesuaian media dengan tujuan dan materi pembelajaran. c. Keberfungsian media.
	4. Sumber Pembelajaran Pkn a. Bentuk Sumber Pembelajaran: 1) Materi bacaan 2) Materi bukan bacaan, Masyarakat 3) Dan Lingkungan b. Jenis Sumber Pembelajaran 1) Sengaja direncanakan

	2) Sengaja dimanfaatkan
	5. Evaluasi Pembelajaran PKn 1) Penilaian proses belajar dan hasil belajar 2) Penilaian <i>knowledge, skill, disposition</i> 3) Penilaian oleh guru, siswa sendiri (<i>self evaluation</i>), dan siswa lain. 4) Bentuk penilaian tertulis (<i>pencil and paper test</i>) dan berdasarkan perbuatan (<i>performance based assessment</i>), penugasan (<i>project</i>), produk (<i>product</i>), atau portofolio. 5) Tindak lanjut hasil penilaian

Tabel 1.2

Indikator Variabel Kompetensi Kewarganegaraan (X₂)

VARIABEL	INDIKATOR
Hasi belajar siswa (variabel X ₂)	1. Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>) 1) Demokrasi dan struktur pemerintahan a. Sistem pemerintahan Indonesia b. Landasan sistem politik Indonesia c. Perwujudan tujuan, nilai, dan prinsip demokrasi oleh pemerintahan yang dibentuk konstitusi 2) Kewarganegaraan, yaitu peran warga negara dalam kehidupan demokrasi di Indonesia 3) <i>Civic Society</i> (masyarakat kewarganegaraan) a. Karakteristik masyarakat kewarganegaraan b. Strategi pemberdayaan masyarakat kewarganegaraan model Indonesia c. Peran individu dalam masyarakat kewarganegaraan.
	2. Kecakapan Kewarganegaraan (<i>Civic Skills</i>) 1) Kecakapan intelektual a. Kemampuan membaca dan memahami informasi tentang pemerintahan dan isu yang ditemukan di media

	<ul style="list-style-type: none"> b. Kemampuan membedakan antara fakta dan opini dalam tulisan teks c. Kemampuan mengartikulasikan konsep abstrak <p>2) Kecakapan partisipatoris</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keahlian partisipasi umum b. Keahlian pemecahan masalah c. Partisipasi melalui kemampuan menganalisis isu-isu publik, kepemimpinan, kelompok mobilisasi, dan komunikasi
	<p>3. Disposisi Kewarganegaraan (<i>Civic disposition</i>)</p> <p>1) Inti disposisi kewarganegaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesopanan b. Empati c. Sikap kepemimpinan sesuai pengalaman organisasi d. Pengambilan pandangan <p>2) Disposisi yang berhubungan dengan partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan masyarakat b. Peran dalam masyarakat c. Sikap positif terhadap perbedaan suku

Tabel 1.3
Indikator Variabel Tingkat Melek Politik (*Political Literacy*) Siswa (Y)

VARIABEL	INDIKATOR
Melek Politik (Variabel Y)	<p>1. Pengetahuan siswa tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian hak dan kewajiban politik sebagai warganegara b. Macam-macam hak politik sebagai warga negara c. Macam – macam kewajiban politik warga negara. d. Tujuan dicantulkannya hak dan kewajiban warga negara dalam undang-undang politik e. Lembaga-lembaga politik yang menyelesaikan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) <p>2. Pemahaman siswa</p>

	<p>tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman terhadap pentingnya jaminan hak politik dalam undang-undang b. Manfaat penegakkan hak politik warganegara dalam Undang-Undang c. Pemahaman tentang akibat pelanggaran terhadap hak politik sebagai warganegara. <p>3. Sikap siswa dalam berpolitik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partisipasi warga negara terhadap masalah perlindungan hak berpolitik b. Menghormati dan menghargai hak politik warganegara lain c. Menghargai upaya perlindungan dan penegakkan hak-hak politik warga negara. <p>4. Perilaku politik warga negara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan hak dan kewajiban politik siswa sebagai pemilih pemula b. Pelaksanaan kewajiban politik siswa sebagai pemilih pemula c. Pelaksanaan demokrasi dalam pemilu siswa sebagai pemilu pemula
--	---

G. Hipotesis

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa PKn dapat membentuk siswa yang memiliki tingkat melek politik yang tinggi. PKn dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap politik serta dapat membentuk sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan implementasi aturan politik.

Bertolak dari asumsi tersebut dan mengacu kepada rumusan masalah, maka dapat dikemukakan rumusan **hipotesis mayor** sebagai berikut: Melek Politik siswa dipengaruhi secara positif oleh PKn.

Untuk lebih spesifik dan jelasnya, hipotesis mayor tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa **hipotesis minor** berikut ini:

1. Pembelajaran PKn memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam membina melek politik siswa.
2. Kompetensi kewarganegaraan memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam membina melek politik siswa.
3. Pembelajaran PKn dan kompetensi kewarganegaraan secara bersama-sama memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam membina melek politik siswa.

H. Metode Penelitian

Menurut jenis pendekatan, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang ada pada masa sekarang (Nazir, 1988:63; Surahmad, 1990:140). Metode deskriptif-analitis dalam penelitian dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2001: 14).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket, wawancara serta studi dokumentasi.

I. Variabel Penelitian

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi ini meliputi materi pembelajaran PKn (X_1) dan hasil belajar PKn (X_2). Adapun yang menjadi variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat melek politik siswa.

Sesuai perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pola hubungan antar variabel penelitian dapat dideskripsikan pada table 1.

Setiap terminologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan dalam lapangan studi yang berbeda.

Tabel 1.1
Hubungan Antar Variabel

Variabel Bebas	Variabel Terikat
Materi Pembelajaran PKn (X_1)	Melek politik siswa (Y)
Kompetensi Kn (X_2)	

J. Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri di kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri kelas XI di kota Bandung. Sampel penelitian adalah 104 siswa SMA kelas XI di 3 SMA Negeri yang berada di Kota Bandung (SMA Negeri 2, 6, 15) yang ditentukan melalui *cluster sampling* dan *proportional random sampling*.